

PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KAB. OKI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2019

Djenni Sasmita, S. AP., M. A

Universitas Muhammadiyah Tangerang
jennysasmita0@gmail.com

Keyword	Abstract
<i>Performance, Value For Money, Economics, Efficiency, Effectiveness.</i>	<i>This study aims to determine the performance of the Regional Wealth and Financial Revenue Service (DPKAD) of Oki District, South Sumatra by using the concept of Value For Money. This research was conducted by collecting data for 3 years, from 2017 to 2019. This study used secondary data. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis method. Based on the results of research using the concept of Value For Money based on 3 main elements, namely economy, efficiency and effectiveness, it shows that: Economic ratios get 86.54%, 82.64% and 71.43%, which means that the economic ratio is below 100% during 2017 -2019 and the results of this ratio indicate that the criteria for economic ratios are categorized as "economic". The efficiency ratio during the research year of this ratio was 94.69%, 105.17% and 97.95%, although in 2018 the ratio was less efficient because the percentage was above 100%. However, the performance of the Oki district government as a whole is included in the "efficient" category. Meanwhile, the ratio of effectiveness obtained is 96.53%, 86.65% and 76.98%, where the percentage ratio below 100% indicates that this ratio is considered "ineffective". Based on the research results, the concept of Value For Money is very well applied to Oki District DPKAD because it can provide a more structured and comprehensive picture of performance.</i>

© 2020 JMB, All right reserved

I. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (Anonim dalam Sari, 2016). Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan

memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya

transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Sari, 2016).

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Kabupaten/Kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Nugrahani, 2007). Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2012:21). Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep *value for money*, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Khikmah, 2018).

Menurut Mardiasmo (2004:4) *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Elemen yang pertama dari konsep *value for money* yaitu ekonomi. Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh ma- na organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan

yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Elemen yang kedua dari konsep *value for money* ialah efisiensi. Efisiensi yaitu pencapaian *output* dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Semakin rendah nilai rasio efisiensi yang di peroleh, maka semakin bagus pula kinerja organisasi sektor publik tersebut. Dan elemen yang terakhir dari konsep *value for money* yaitu efektivitas. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Kabupaten Oki dalam pemerintahannya serta mendapatkan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatan daerahnya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Oki Sumsel merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Oki Sumsel. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Oki memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar. Tahun anggaran 2017, prioritas APBD adalah meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan tahun 2018 dan 2019, diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah anggarannya telah melebihi satu triliun rupiah dan kenaikannya cukup signifikan.

Persentase Kinerja Pemerintah Kab. Oki Sumsel dengan menggunakan Konsep *Value For Money*

Value For Money	2017	2018	2019
Rasio Ekonomi	86,54%	82,64%	71,43%
Rasio Efisiensi	94,69%	105,17%	97,95%
Rasio Efektivitas	96,53%	86,65%	76,98%

Tabel 1. Data Sekunder
Persentase Tahun 2017-2019

Dapat dilihat pada tabel persentase kinerja Pemerintah Kabupaten Oki dengan menggunakan konsep *value for money* yang di peroleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Oki. Dimana rasio ekonomi diperoleh dari perbandingan anggaran pengeluaran (belanja) dengan realisasi pengeluaran. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio ekonomis selama 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan yang berarti bahwa hal tersebut baik bagi Pemerintah Kabupaten Oki karena rasionya bernilai di bawah 100%.

Apabila dilihat dari segi efisiensi Dimana rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Oki cukup baik. Dimana pada tahun 2017 nilai rasio efisiensi yang di peroleh dari perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan senilai 94,69% dan pada tahun 2018 naik menjadi 105,17% dan turun menjadi 97,95% pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2018 menunjukkan rasio yang kurang efisien. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Oki telah efisien. Apabila dilihat dari segi efektifitas, yang memperlihatkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Yang berarti bahwa selama 3 tahun tersebut kinerja Pemerintah Kabupaten Oki tidak efektif, dikarenakan realisasi anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Hal ini terbukti dengan masih adanya kekurangan, seperti banyaknya proyek fisik dan bantuan untuk masyarakat tak dapat direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota/kab (APBKAB).

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Oki menggunakan konsep *value for money* dengan harapan dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis berminat mengambil judul penelitian **Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Oki Periode Tahun 2017-2019.**

II. METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian yang penulis teliti adalah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD) Kabupaten Oki yang berlokasi di Ogan Komering Ilir Sumsel. Jenis dan sumber data dalam Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2017-2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan yang kemudian diklasifikasikan dan dianalisis. Variabel dalam penelitian ini adalah *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

a) Rasio Ekonomi

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya di peroleh dengan harga lebih rendah yaitu harga yang mendekati harga pasar. Nilai ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara *input* dan harga *input*. Dimana *input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan kegiatan.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis

berimbang

Mahsun (2006:179) rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran- pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran dan realisasinya.

b) Rasio Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Dimana *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan,

sedangkan *input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan kegiatan.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien

berimbang

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi biaya yang dikeluarkan terhadap realisasi pendapatan. Sehingga apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata terlalu sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan sangat besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, maka kebijakan tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien.

c) Rasio Efektifitas

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Dimana *outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Sehingga ukuran efektivitas dapat diartikan sebagai suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektif berimbang

Halim (2008:234) rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Rasio Ekonomis

Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang di mungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan.

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa presentase tingkat pencapaian. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya (Andriani, 2012). Rasio ekonomis atau perubahan biaya dikatakan baik apabila besarnya tingkat pembelanjaan yang direalisasikan lebih rendah dari yang sudah dianggarkan.

Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomis
2017	727.480.904.420,00	840.599.869.766,84	86,54%
2018	879.070.194.380,00	1.063.632.768.408,58	82,64%
2019	890.338.348.966,21	1.246.375.866.172,00	71,43%

Tabel 2. Data Rasio Tahun 2017-2019

Rasio ekonomis yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten Oki pada tahun tersebut dinilai ekonomis. Dikarenakan hasil rasio selama 3 tahun tersebut berada di bawah 100%. Dapat diketahui bahwa semakin rendah rasio ekonomi yang diperoleh maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya penghematan pada belanja operasi dan belanja modal seperti belanja barang, belanja peralatan dan mesin yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga untuk indikator

rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Oki sudah mencapai kinerja yang baik, karena dari tahun 2017-2019 (periode pengamatan), telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik.

Rasio Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Pengukuran organisasi sektor publik dikatakan efisien apabila menghasilkan *output* sebesar-besarnya dan menggunakan *input* serendah-rendahnya.

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. Kinerja Pemerintah Daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%, atau Semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai, maka kinerjanya semakin baik. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan (Andriani, 2012).

Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2017	727.480.904	768.270.271	94,69%
2018	879.070.194	835.809.796	105,17%
2019	890.338.348	908.888.389	97,95%

Tabel 3. Data Sekunder Tahun 2017-2019

Pada tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 94,69%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 105,17%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun

2019 sebesar 97,95%. Yang berarti bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Oki pada tahun 2017 dinyatakan efisien. Sedangkan pada tahun 2018 rasio efisiensi berada >100% yang artinya pada tahun 2018 belanja Pemerintah Kabupaten Oki lebih besar dibandingkan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2018 tidak efisien karena rasio yang melebihi 100%. Kemudian tahun 2019, hal ini sama seperti pada tahun 2017 bahwa pada tahun 2019 rasionya kembali turun yang berarti efisien. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Oki telah efisien, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum.

Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan, tingkat efektifitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi anggaran dengan anggaran pendapatan (penerimaan) dan presentase tingkat pencapaiannya (Putra, 2017).

Rasio Efektifitas Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Anggaran	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektifitas
2017	768.270.271	795.850.276	96,53%
2018	835.809.796	964.491.807	86,65%
2019	908.888.389	1.180.645.303	76,98%

Tabel 4. Data Sekunder Tahun 2017-2019

Dapat di ketahui bahwa pada tahun pengamatan mulai 2017-2019 dengan nilai rasio 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio

efektifitas yang bernilai <100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten OKI pada tahun tersebut dinilai tidak efektif. Dikarenakan suatu organisasi sektor publik akan di katakan efektif apabila persentase rasionya >100%. Semakin besar rasio efektifitas yang didapat sebuah organisasi tersebut, maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Menurut Mardiasmo (134: 2004) menyatakan bahwa biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian yang memperoleh rasio efektifitas dengan hasil yang efektif ialah yang mendapatkan persentase rasio di atas 100% atau lebih. Sebaliknya jika rasio yang diperoleh di bawah 100% maka hasil rasio ini bernilai tidak efektif. Ketidakefektifitas ini terjadi karena tidak mampunya Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan target kegiatan atau program kerja yang telah ditetapkan. Sehingga terjadinya beberapa proyek fisik yang tidak dapat direalisasikan pada periode yang telah ditetapkan.

Hal ini terbukti dengan masih adanya kekurangan pada Pemerintah Kabupaten OKI, seperti banyaknya proyek fisik dan bantuan untuk masyarakat yang tidak dapat direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau Kabupaten (APBKAB).

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tentang penerapan konsep *value for money* pada Pemerintah Kabupaten Oki Sumsel, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten OKI dapat menerapkan *value for money* sebagai konsep pengukuran kinerjanya, karena dengan konsep *value for money* pemerintah dapat mengukur kinerja organisasi dengan lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. Penerapan konsep *value for money* melalui tiga elemen, yaitu :

1. Rasio ekonomis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten OKI menunjukkan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2017-2019 bernilai 86,54%, 82,64%, 71,43%, menunjukkan bahwa rasio ini bernilai ekonomis. Sehingga untuk indikator rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten OKI sudah mencapai kinerja yang baik, karena dari tahun 2017-2019 (periode pengamatan), telah berhasil mengelola penggunaan anggaran belanja dengan baik. Rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten OKI cukup baik. Dimana pada tahun 2017 nilai rasio efisiensi yang di peroleh senilai 94,69% dan pada tahun 2018 naik menjadi 105,17% dan turun menjadi 97,95% pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2018 menunjukkan rasio yang kurang efisien. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten OKI telah efisien, yang berarti bahwa pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum. Karena, suatu organisasi akan di katakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien.
2. Rasio efektifitas pada Pemerintah Kabupaten OKI periode 2017-2019 dengan nilai rasio 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio efektifitas yang bernilai <100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten OKI pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Risa Dwi. (2017). **Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik**. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Andriani, Sri. (2012). **Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu**. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arfan, Demi Aulia. (2014). **Analisis Value For Money Dalam Pengukuran**

- Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012.** Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ferina, Ika Sasti, dan Fika Arista. 2013. **Penilaian Kinerja Dengan Menerapkan Indikator Value For Money Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009-2011.** Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Sriwijaya.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kurniawati, Nova, dan Vidya Vitta Adhivinna. (2014). **Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.** Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta.
- Liando, Harry Saputra, dkk. (2014). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangie menggunakan metode Value For Money.** Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Universitas Samratulangi Manado.